



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**PADA MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020 - 2021
13 - 17 DESEMBER 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2020**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, BUMN, dan Investasi melakukan kunjungan kerja ke daerah guna mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2020 – 2021, Komisi VI DPR RI telah melakukan kunjungan kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Kepulauan Riau yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 17 Desember 2020.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja

Secara umum kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, kinerja beberapa BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Secara lebih khusus, kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam mengingat kondisi pandemi menyebabkan tekanan yang cukup berat pada perekonomian di Kepulauan Riau dan Kota Batam termasuk strategi penyelesaiannya khususnya dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

C. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI

NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN
A-189	ARIA BIMA	PIMPINAN / F.PDIP
A-170	RIEKE DIAH PITALOKA.	F-PDIP
A-251	Ir.DEDDY YEVRİ HANTERU SITORUS, M.A.	F-PDIP
A-209	SONNY T.DANAPARAMITA	F-PDIP
A-25	ST.ANANTA WAHANA, SH.,MH.	F-PDIP
A-274	Ir.H.M.IDRIS LAENA	F-P.GOLKAR
A-305	H.SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H.,M.M.	F-P.GOLKAR
A-94	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.BUS, MM, MBA	F-P.GERINDRA
A-362	Drs.H. NYAT KADIR	F-P.NASDEM
A-361	ZURISTYO FIRMADATA, SE.,MM.	F-P.NASDEM
A-25	SITI MUKAROMAH, S.Ag.,MAP.	F-PKB
A-11	TOMMY KURNIAWAN	F-PKB
A-542	H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si	F-P.DEMOKRAT
A-554	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	F-P.DEMOKRAT
A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	F-PKS
A-433	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos	F-PKS
A-506	ABDUL HAKIM BAFAGIH	F-PAN
A-500	DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.	F-PAN
A-493	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos	F-PAN
A-463	ELLY RACHMAT YASIN	F-PPP

D. Objek Kunjungan Kerja

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja Reses tersebut, beberapa pihak yang akan terlibat dalam kunjungan reses ini antara lain :

1. Beberapa Kementerian/Lembaga terkait antara lain :
 - a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
 - b. Kementerian BUMN
 - c. Kementerian Perindustrian
 - d. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
2. Beberapa BUMN (Termasuk Anak Persahaan BUMN) antara lain :
 - a. PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
 - b. Perum Bulog
 - c. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
 - d. PT PGN Tbk.

Beberapa fokus topik pembahasan dalam kunjungan kerja reses di Provinsi Kepulauan Riau ini antara lain:

1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam termasuk Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Strategi dan inovasi dalam rangka pengembangan ekonomi (khususnya industri dan pariwisata) Pulau Batam.
3. Ketersediaan pangan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam rangka menyambut libur panjang nasional Natal dan Tahun Baru.
4. Perkembangan industri gas di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya dan Pulau Batam pada khususnya.
5. Kondisi aktual dan pengembangan industri kepelabuhanan di Pulau Batam.

II. INFORMASI KUNJUNGAN KERJA

Beberapa informasi yang disampaikan oleh mitra kerja Komisi VI DPR RI pada saat kunjungan kerja reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 ke Provinsi Kepulauan Riau secara terperinci sebagai berikut :

A. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

Secara garis besar BP Batam menyampaikan bahwa pada masa pandemi Covid-19, kondisi perekonomian di Pulau Batam sangat terdampak. Sektor yang paling terdampak oleh Pandemi Covid-19 di Batam adalah sektor pariwisata. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Pulau Batam, dimana mayoritas wisatawan tersebut berasal dari Singapura (yang merupakan penyumbang jumlah wisatawan mancanegara terbesar di Batam).

Selain di sektor pariwisata, pandemi Covid-19 juga berdampak pada penurunan aktivitas produksi beberapa industri di Pulau Batam. Hal tersebut berdampak secara langsung pada pengurangan tenaga kerja.

Di sisi internal BP Batam, kondisi Pandemi Covid-19 menyebabkan penyesuaian anggaran tahun 2020 dimana BP Batam mendapat pemotongan anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 212,69 Miliar sehingga anggaran BP Batam menurun dari Rp. 2.226,89 Miliar menjadi Rp. 2.014,19 Miliar.

Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh BP Batam dalam menangani dampak pandemi Covid tersebut antara lain :

1. Peningkatan belanja PNBPN untuk percepatan pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan dan pelebaran jalan menuju pelabuhan, pembangunan pipa dari waduk Tembesi ke waduk Duriangkang untuk menjamin ketersediaan air baku.

2. Pemberian kemudahan bagi perusahaan yang mengalami hambatan untuk bisa beroperasi kembali secara *new normal*.
3. Optimalisasi peran dan fungsi kawasan-kawasan industri melalui pembangunan infrastruktur, pemberian insentif, kemudahan perizinan dan jaminan keamanan seperti :
 - a. Pemberian keringanan pembayaran UWT, dapat berupa pengurangan dan penghapusan diskon denda.
 - b. Percepatan perizinan antara lain investasi, tata niaga serta keringanan beberapa pungutan di pelabuhan dan bandara.

Fokus pembangunan Batam di tahun 2021 mengacu pada salah satu rencana strategis 2020-2024 serta Fokus Pembangunan Nasional berdasarkan RKP 2021 yaitu Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi.

Beberapa bidang/sector yang menjadi fokus pengembangan tersebut antara lain :

1. Industri Manufaktur, dengan fokus di industri *Smartphone*, Teknologi Informasi dan Kedirgantaraan.
2. Pengembangan Logistik, dengan fokus di sektor *transshipment*, *e-commerce*, *warehouse*, dan *infrastructure link*.
3. Jasa, dengan fokus beberapa sector sebagai berikut :
 - a. *Maintenance, Repair and Overhaul* (MRO) Pesawat dan Kapal.
 - b. *Shipbuilding/Shipyard*.
 - c. Pendidikan dan Kesehatan Internasional.
 - d. *Financial Service* dan *Digital Finance*.
4. Pariwisata dengan fokus pengembangan tujuan wisata yang pro-edukasi, UMKM dan lingkungan serta industri kreatif (*cinematography*).

Terkait dengan target tersebut, strategi BP Batam di tahun 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan investasi swasta dalam sector industri jasa, logistik dan pariwisata.
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung sector prioritas.
3. Harmonisasi peraturan pendukung investasi.
4. Meningkatkan pelayanan dengan penyederhanaan regulasi dan birokrasi.
5. Meningkatkan pemanfaatan aset menjadi penerimaan yang optimal.
6. Upaya penurunan biaya logistik.

Beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pengembangan Batam antara lain:

1. Masih ada peraturan Kementerian/Lembaga yang menghambat kelancaran berusaha di BP Batam.

2. Revisi peraturan tentang *master plan* tata ruang kawasan Batam yang belum selesai.
3. Keterbatasan penyediaan anggaran dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi.
4. Tingginya biaya logistik dibandingkan kota dan negara lain sehingga perlu penambahan jalur pelayaran langsung ke luar negeri dan peningkatan kapasitas *container yard*.

B. PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)

Secara garis besar PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau batam (Persero) atau **selanjutnya disingkat Persero** Batam menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi singkat terkait dengan Persero Batam sebagai berikut :

Nama Perusahaan	PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau batam (Persero)
Tahun Berdiri	Tahun 1973 Berdasarkan PP No. 43 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam
Kepemilikan Saham	100% Pemerintah Republik Indonesia
Bidang Usaha	a. Jasa Bongkar Muat b. Jasa Transportasi Kontainer dan Kargo c. Jasa Pergudangan Kargo udara dan Tempat Penyimpanan Sementara d. Jasa Penyewaan Properti Pergudangan Tertutup e. Jasa Penyewaan Properti Lapangan Penumpukan Terbuka f. Jasa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

2. Akibat Pandemi Covid-19, terjadi penurunan kinerja perusahaan yang disebabkan oleh penurunan volume kegiatan baik dari sektor bongkar muat, angkutan barang serta pergudangan. Hal tersebut menyebabkan sampai dengan semester I tahun 2020, pendapatan usaha baru mencapai 48% dari RKAP 2020 dan baru mencapai 47% dari pendapatan tahun 2019.
3. Strategi perusahaan dalam mengatasi dampak pandemi tersebut antara lain :
 - a. Melakukan efisiensi biaya operasional.
 - b. Pengembangan usaha *container yard* dan depo container.
 - c. Pengembangan usaha melalui platform NLE / BLE.

- d. Sinergi BUMN.
4. Inisiatif strategi Perusahaan di tahun 2021 antara lain :
 - a. Peningkatan sinergi BUMN dan *Sub Cluster* BUMN Kawasan Industri.
 - b. Pengembangan *platform* logistik yang terintegrasi dengan NLE/BLE.
 - c. Pengembangan bisnis di lahan batu ampar depo container.
 - d. Proses PMN Non Tunai atas lahan-lahan.
5. Kontribusi Persero batam terhadap perekonomian wilayah dan Pemerintah daerah antara lain :
 - a. Menyelenggarakan usaha untuk menunjang kegiatan penanaman modal di Pulau Batam.
 - b. Menunjang kelancaran lalu lintas barang dan perdagangan melalui laut, darat dan udara.
 - c. Pajak dan retribusi daerah.
 - d. Penyerapan tenaga kerja.
 - e. Pembinaan kepada pemilik UMKM di Batam melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

C. Perum Bulog

Beberapa hal penting yang disampaikan oleh Perum Bulog pada pertemuan dengan Komisi VI sebagai berikut :

1. Realisasi beras tahun 2019 di wilayah Riau dan Kepulauan Riau mencapai 154,18%. Namun realisasi tersebut menurun drastis di tahun 2020 dimana realisasi beras untuk wilayah Riau dan Kepulauan Riau hanya sebesar 34,60% (posisi tanggal 09 Desember 2020) dari target tahun 2020 yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan Perum Bulog yang tidak menjadikan wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebagai prioritas sentra penghasil beras.
2. Secara terperinci realisasi pengadaan beras di wilayah Riau dan Kepulauan Riau tergambar dalam tabel sbb :

(dalam ton)

NO	KANTOR WILAYAH/KANTOR CABANG	2019			2020		
		TARGET	REALISASI	% REAL vs TARGET	TARGET	REALISASI *)	% REAL vs TARGET
1	KANWIL RIAU & KEPRI	240	2.922	1217,60%	3.545	3.310	93,36%
2	KCP KAMPAR	409	500	122,13%	2.836	505	17,82%
3	KANCAB TANJUNG PINANG	205	305	148,98%	1.418	64	4,50%
4	KCP RANAI - NATUNA	-	-	0,00%	-	-	0,00%
5	KANCAB DUMAI	590	630	106,78%	3.191	376	11,78%
6	KANCAB BATAM	200	1.196	597,77%	1.418	1.580	111,40%
7	KANCAB BENGKALIS	933	338	36,20%	2.659	555	20,87%
8	KANCAB TEMBILAHAN	955	449	47,06%	2.659	175	6,58%
9	KANCAB RENGAT	884	469	53,00%	1.773	182	10,27%
TOTAL		4.416	6.808	154,18%	19.500	6.747	34,60%

*) per 9 Desember 2020

3. Posisi persediaan beras CBP di wilayah Riau dan Kepulauan Riau per 09 Desember 2020 sebesar 11.329 Ton dan beras komersial sebesar Rp. 971 Ton sehingga total persediaan beras Bulog di wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebesar 12.300 Ton.
4. Infrastruktur Bulog di wilayah Riau dan Kepulauan Riau sbb :
 - a. Kantor Cabang sebanyak 6 unit
 - b. Kantor Cabang Pembantu sebanyak 2 unit
 - c. Gudang sebanyak 23 unit dengan kapasitas gudang sebesar 44.800 Ton.

D. PT PGN Tbk.

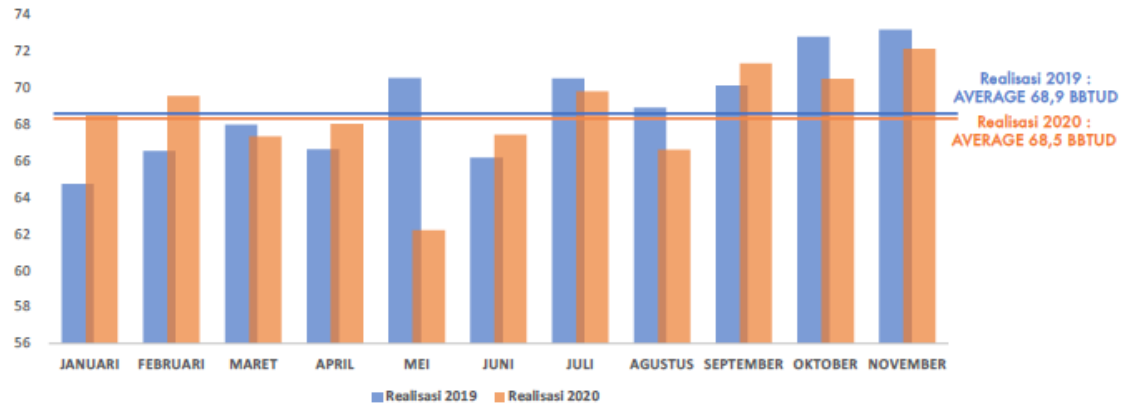
Beberapa hal penting yang disampaikan oleh PT PGN Tbk. pada pertemuan dengan Komisi VI DPR RI sebagai berikut :

1. Program strategis *subholding* gas atau yang dikenal dengan sapta PGN (2020-2026) sebagai berikut :
 - a. PGN Sayang Ibu yaitu program pengembangan jaringan gas bumi untuk sektor rumah tangga.
 - b. PGN Mendukung Industri Khusus yaitu program penyediaan gas bumi untuk 7 sektor industri khusus sesuai dengan Kepmen 89/2020 terkait dengan dukungan penyediaan gas untuk *new captive market*.
 - c. PGN Untuk Listrik Nasional yaitu program penyediaan gas bumi untuk sektor kelistrikan sesuai dengan RUPTL, Kepmen 91/2000 dan Kepmen 13/2020.
 - d. PGN Retail dan Industri Umum yaitu program penyediaan gas bumi untuk sektor industri umum melalui pipa maupun non pipa.
 - e. PGN Maritim yaitu program konversi transportasi sektor laut menjadi berbahan bakar LNG.
 - f. PGN Sektor Darat yaitu program konversi transportasi sektor darat menjadi berbahan bakar gas dan LNG.
 - g. PGN Masuk Desa yaitu program *pellet* sebagai sumber alternatif energi untuk masyarakat yang berlokasi di luar jangkauan infrastruktur pipa dan non pipa.
2. PGN Area Batam mengelola niaga gas bumi sebesar 68,5 BBTUD melalui infrastruktur pipa dengan panjang 232 Km (data tahun 2020).
3. Untuk bisnis niaga gas bumi di Kepulauan Riau, pasokan gas untuk area batam berasal dari lapangan Grissik yang disalurkan melalui pipa transmisi Grissik-Singapura. Infrastruktur gas PGN tersebar dan melewati beberapa kawasan industri dan pusat keramaian di Batam seperti Tanjung Uncang, Panbil, Batamindo, Kabil, Batam Centre dan Lubuk Baja.

4. Secara umum pandemi Covid-19 tidak berdampak cukup signifikan terhadap rata-rata niaga gas tahun 2020. Secara *Year to Date*, realisasi niaga gas hanya turun sebesar 0,6%. Penurunan tersebut terjadi pada segmen komersial dan *hospitality*, sedangkan pelanggan listrik relatif tetap. Realisasi niaga gas area batam tahun 2019 dan 2020 ditunjukkan pada grafik sbb :

REALISASI NIAGA GAS AREA BATAM TAHUN 2019 dan 2020

Tahun 2019 dan 2020 dalam BBTUD



5. Terkait dengan proyeksi bisnis, diperkirakan sektor *retail* dan industri akan mengalami pertumbuhan kurang lebih 1,6% per tahun. Pada Tahun 2026 diperkirakan ada penambahan *demand retail* sebesar 0,88 BBTUD.
6. Saat ini infrastruktur distribusi Batam dan sumber pasokan dari lapangan gas Grissik masih cukup untuk melayani tambahan pelanggan gas retail dan industri sampai dengan tahun 2026.

E. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Beberapa hal penting yang disampaikan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang selanjutnya disebut Pelindo I pada pertemuan dengan Komisi VI sebagai berikut :

1. Pelindo 1 mengelola 15 cabang pelabuhan, 8 kawasan pelabuhan, 1 unit usaha dan 5 anak perusahaan yang berlokasi di 4 Provinsi dimana cabangnya sebagian besar tersebar di Selat Malaka yang merupakan salah satu selat tersibuk di dunia. *Hinterland* Pelindo I didominasi oleh produk pertanian, perkebunan, dan pertambangan.

2. Untuk wilayah kepulauan Riau, potensi bisnis Pelindo I cukup besar dikarenakan lokasi yang strategis (dekat dengan Singapura), memiliki beberapa kawasan industri seperti Batam dan Bintan serta memiliki cadangan migas yang tinggi. Selain itu, area perairan Kepulauan Riau merupakan area perairan Indonesia tersibuk dikarenakan aktivitas kapal-kapal minyak (tanker).
3. Area Pelindo I cabang Batam meliputi Batam, Pulau Sambu, Nipah, Tanjung Balai Karimun dan Tanjung Pinang.
4. Pelindo I cabang Batam telah menjalin kerjasama dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan menggunakan sistem *Host to Host*.
5. Kegiatan bisnis Pelindo I cabang Batam adalah pelayanan jasa pemanduan dan penundaan dengan segmen sebagai berikut :
 - a. Segmen Usaha Pelayanan Jasa Pemanduan:
 - 1) Lokasi Batam:
 - a. Perairan Wajib Pandu Kelas III Batu Ampar (Sejak Tahun 1990);
 - b. Perairan Wajib Pandu Kelas I Sambu Tersus Pertamina (Sejak Tahun 1990);
 - c. Perairan Wajib Pandu Kelas III Kabil (Sejak Tahun 1990);
 - d. Perairan Wajib Pandu Kelas II Tanjung Uncang & Wajib Pandu Kelas II Sekupang (Sejak Tahun 2009);
 - e. Perairan Tersus Pulau Bulan (sejak September 2019).
 - 2) Lokasi Nipah & Selat Malaka-Singapura:
 - a. Perairan Wajib Pandu Kelas I Nipah Selat Singapura (Sejak Tahun 2007);
 - b. Perairan Pandu Luar Biasa Selat Malaka-Singapura (Sejak Mei 2015).
 - b. Segmen Usaha Pelayanan Penundaan Kapal :
 - 1) Lokasi Batam (Batu Ampar, Kabil & Tanjung Uncang) :
 - a. Sejak Maret 2017 s/d Agustus 2019 dengan *Marketing Sendiri* (tarif Direksi);
 - b. Sejak September 2019 Mengikuti Sistem *Host to Host* BP Batam (mandatory tarif BP Batam).
 - 2) Lokasi STS Nipah
 - a. Sejak Maret 2017 s/d Januari 2020 dengan *Marketing Sendiri* (tarif Direksi);
 - b. Sejak Februari 2020 kerjasama dengan STS Provider (tarif Kesepakatan).

6. Kinerja finansial Pelindo I cabang Batam sampai dengan saat ini masih memunjukkan peningkatan
7. Kolaborasi Pelindo I cabang Batam dengan BUMN sebagai berikut :
 - a. Dengan Bank BUMN untuk pengelolaan dana Pelindo I cabang Batam.
 - b. Dengan Persero Batam berupa rencana kerjasama untuk pelayanan jasa kepelabuhanan.
 - c. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam hal kerjasama klasifikasi kapal-kapal miliki Pelindo I cabang Batam.
 - d. Kerjasama dengan Pertamina dan afiliasinya dalam pelayanan kapal dan pengadaan bahan bakar minyak.

III. CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada seluruh mitra pada saat pelaksanaan kunjungan kerja reses ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian mitra (Kementerian/Lembaga) atau BUMN yang diundang dalam pertemuan. Catatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

A. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)

1. Batam memiliki potensi yang sangat besar baik sebagai sentra industri maupun pariwisata. Batam juga menjadi titik terluar Indonesia dan merupakan etalase Indonesia. Namun demikian, pengembangan Batam sampai dengan saat ini tidak sesuai harapan. Diharapkan BP Batam mampu melakukan terobosan-terobosan agar Batam dapat berkembang sesuai dengan yang dicita-citakan.
2. Ego sektoral masih menjadi permasalahan besar dalam proses pengembangan Batam. Banyak peraturan antar lembaga yang saling tumpang tindih. Diharapkan BP Batam mampu melakukan sinergi lebih baik dengan Kementerian/Lembaga lain termasuk peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meminimalisasi ego sektoral demi pengembangan Batam yang lebih baik.
3. Target dan strategi pengembangan Batam selama ini dinilai masih normatif (belum *achievable* dan *measurable*). BP Batam perlu menyusun target pengembangan Batam yang lebih spesifik, terukur dan dapat tercapai.
4. BP Batam perlu melakukan perbaikan secara fundamental termasuk meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah (walikota) Batam mengingat ada sejarah dualisme kepemimpinan di Batam.

5. Sampai saat ini, Batam dirasa belum memiliki ikon pariwisata yang menarik. Diharapkan BP Batam beserta seluruh pihak terkait mampu menghadirkan ikon pariwisata Batam serta melakukan pengembangan pariwisata yang lebih optimal di Batam.
6. Saat ini Bandara International Hang Nadim Batam masih dikelola oleh BP Batam (bekerjasama dengan Persero Batam). BP Batam diharapkan mampu menjajaki kerjasama Bandara dengan pihak lain seperti Angkasa Pura I atau investor lainnya sehingga pengembangan Bandara Batam dapat dilakukan secara lebih pesat sehingga Bandara Batam mampu menjadi *revenue centre* (bukan *cost centre*).
7. Mengingat Batam merupakan sentra industri dan pariwisata, BP Batam beserta pihak terkait harus memperhatikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang sektor-sektor tersebut.
8. BP Batam berkoordinasi dengan pihak terkait diharapkan memberikan perhatian khusus pada tingginya biaya logistik (yang berdampak pada tingginya harga barang) serta menyusun langkah strategi untuk menekan biaya logistik.

B. PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)

1. Saat ini banyak proyek yang dikerjasamakan antara Persero Batam dengan pihak lain seperti Pelindo atau BP Batam. Namun demikian, masih ditemukan beberapa hal terkait tumpang tindih kewenangan. Diharapkan Persero Batam (berkoordinasi dengan pihak terkait) mampu menguraikan tugas dan fungsi masing-masing pihak agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan beberapa proyek/infrastruktur di Batam.
2. Diharapkan Persero Batam mampu melakukan terobosan serta langkah inovasi dalam rangka mengembangkan perekonomian Batam dengan lebih baik.

C. Perum Bulog

1. Saat ini Perum Bulog terbebani oleh biaya bunga hutang Bank yang cukup tinggi. Beban biaya bunga yang tinggi tersebut dapat berdampak pada penurunan kinerja perusahaan serta pelayanan kepada masyarakat. Perum Bulog perlu memperhatikan hal ini dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait agar permasalahan ini dapat diselesaikan sehingga Perum Bulog dapat fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Diharapkan kedepannya Bulog tidak hanya fokus pada komoditas beras namun juga komoditas penting lainnya. Selain itu, diharapkan Bulog lebih berperan dalam Badan Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
3. Bulog diharapkan mampu menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas harga bahan pokok khususnya Beras di Kepulauan Riau yang kondisi geografisnya berbentuk Kepulauan dan memiliki tantangan yang besar dalam hal distribusi.

D. PT PGN Tbk.

1. Saat ini ada dua jaringan gas yang diadakan dan dikelola oleh PGN yaitu jaringan gas yang dibiayai APBN serta jaringan gas mandiri. Namun demikian, ada *image* bahwa jaringan gas yang dibiayai APBN ini kurang berkualitas terutama dalam hal pembangunan infrastruktur yang tidak rapi (pembukaan jalan, pemasangan pipa dsb). Diharapkan PGN juga menaruh perhatian pada pengelolaan jaringan gas APBN tersebut sehingga sama-sama memiliki *image* yang positif sama halnya dengan jaringan gas mandiri.
2. PGN diharapkan mampu melakukan langkah strategi yang cermat sehingga mampu menawarkan harga yang lebih kompetitif.
3. Pulau Batam dan Bintan memiliki potensi yang sangat besar khususnya di sektor industri, pariwisata termasuk *hospitality*. Hal ini harus mampu dimanfaatkan oleh PGN sehingga mampu menjadi *champion* di kawasan Kepulauan Riau.
4. PGN harus menyusun langkah strategi dan terobosan yang lebih baik agar jaringan gas mampu menjangkau masyarakat miskin.

E. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)

1. Pelindo I berkoordinasi dengan lembaga/pihak terkait diharapkan memperhatikan tingginya ongkos jasa *marine* (pemanduan dan penundaan kapal) sehingga kedepannya ongkos tersebut dapat diturunkan.
2. Pelindo I diharapkan dapat meningkatkan bisnis penyediaan air bersih untuk aktivitas pelayaran (*marine*) yang saat ini belum menjadi prioritas.

Keterangan :

1. Catatan dan rekomendasi tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan pada rapat kerja dengan Kementerian/Lembaga terkait yang menjadi mitra Komisi VI DPR RI.

2. Dalam pertemuan hadir pula perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seluruh masukan dari anggota tim Kunker Reses Komisi VI DPR RI secara langsung telah dicatat dan menjadi bahan masukan Kementerian/Lembaga terkait yang turut hadir dalam pertemuan.

IV. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau pada masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 14 Januari 2020
Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI
Ke Provinsi Kepulauan Riau

TTD.

Aria Bima

A-189

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN



Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Kepulauan Riau Beserta Mitra Kerja



Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Kepulauan Riau Memimpin Jalannya Rapat



Sesi Tanya Jawab Oleh Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Kepulauan Riau



Sesi Tanya Jawab Oleh Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Kepulauan Riau